UNIKOM

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Seusai dengan tempat Kerja Praktek yang telah dilaksanakan dan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulis perlu menguraikan bidang yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Kepegawaian pada BKN Kanreg III Bandung yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan standar kompetensi jabatan
b. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian
c. Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kanreg BKN

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 9 Desember 2002 sampai dengan 9 Januari 2003. Setiap hari kerja penulis diminta untuk hadir ke kantor dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00. Di dalam melaksanakan kerja paktek, penulis mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain :

a. Mengambil data-data harian dan melihat daftar hadir pegawai.
b. Melakukan tanya jawab tentang apa yang penulis belum tahu pada pegawai yang bersangkutan.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil dari Pelaksanaan Kerja Praktek itu sendiri adalah Penulis mendapatkan ilmu diluar kegiatan belajar selama mengikuti kuliah kerja praktek disamping itu juga penulis dapat mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan pada BKN Kanreg III Bandung, yaitu pada bidang Pengawasan Kepegawaian.

Berikut Hasil dari Pelaksanaan kerja praktek pada bidang Pengawasan Kepegawaian Pada BKN Kanreg III Bandung :

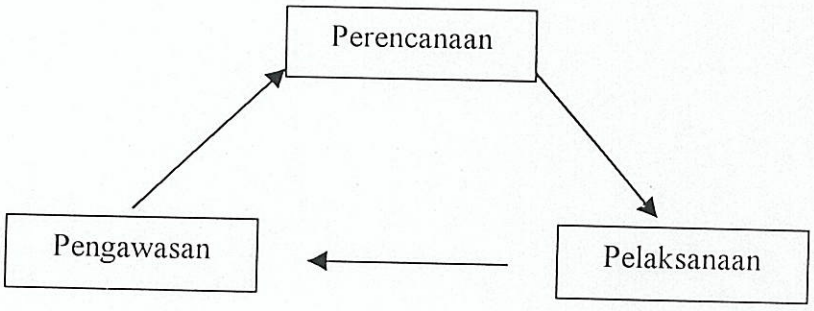
3.3.1. Pokok – pokok Pengawasan

Pengawasan Kepegawaian diartikan keseluruhan proses kegiatan pengamatan dan pengendalian yang berkaian dengan seluruh aktivtas pegawai sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pensiun. Dalam hal ini kegiatan pengawasan dibidang kepegawaian yang dilaksanakan di BKN Kanreg III Bandung. Apakah ada kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

1. Arti Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memberikan umpan balik (feed back) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Secara skematis keberadaan pengawasan dapat digambarkan sebagiamana bagan 1.

Bagan 1.



Pengawasan di bidang kepegawaian adalah keseluruhan proses kegiatan pengamatan atau pengendalian yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pegawai sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pensiun.

2. Landasan Kebijaksanaan Pengawasan

Landasan kebijaksanaan pengawasan dalam organisasi pemerintah adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1998 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara, dalam hal ini BKN telah melaksanakan atau menjalankan sesuai dengan kebijakan tersebut yaitu

a. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan, tuntutan, dan tantangan pembangunan serta kemampuan keuangan.

b. Sistim pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan oleh

masyarakat makin dimantapkan secara terpadu, konsisten, bersifat preventif dan represif agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan

c. Prinsip – prinsip Pengawasan kepegawaian

Ada beberapa prinsip pengawasan yang ada di BKN Kanreg III Bandung yaitu :

a. Obyektif dan menghasilkan fakta;

b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan;

c. Bukan tujuan;

d. Efisiensi;

e. Membimbing dan mendidik

d. Tujuan Pengawasan Kepegawaian

Tujuan pengawasan kepegawaian dari BKN iitu sendiri adalah antara lain sebagai berikut :

a. Menjamin agar pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;

b. Menertibkan koordinasi kegiatan;

c. Mencegah pemborosan, kebocoran dan penyelewengan;

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;

e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Pemerintah.

e. Jenis – jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan yang ada di BKN adalah :

a. Pengawasan Internal

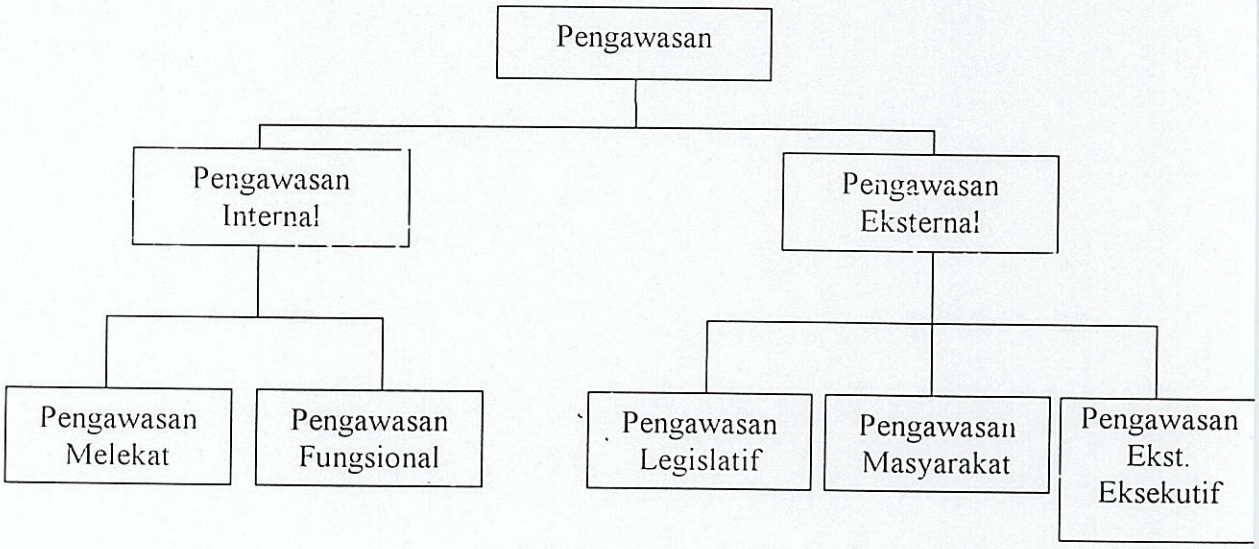
Pengawasan ini dilakukan oleh aparat dan unit fungsional yang ada di instansi.yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal ini biasanya dilakukan oleh instansi luar, yaitu pengawasan Legislatif, Pengawsan Masyarakat dan Pengawasan Eksternal Eksekutuif.

Bagan 2 berikut ini merupakan sistem pengawasan di Indonesia.

Bagan 2 :



3.3.2 PELAKSANAAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pelaksanaan pengawasan di bidang kepegawaian dilaksanakan agar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Hasil

pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan ketentuan di bidang kepegawaian, sehingga pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri sipil pada BKN Kanreg III Bandung bisa berjalan dengan baik.

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kepegawaian BKN membagi 2 pengawasan yaitu :

Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas peraturan kepegawaian. Untuk menghindari dari penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepegawaian, upaya yang dilakukan oleh BKN Kanreg III Bandung dalam aspek preventif ini adalah proaktif dan antisipatif melalui pendekatan antara lain:

1. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan pemikiran diharapkan pegawai memiliki pengetahuan dan kesadaran berkenaan dengan hak dan kewajiban pegawai
3. Menjelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilimp;ahkan kepadanya.
4. Memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti aturan dengan baik dan menjatuhkan hukuman bagi pegawai yang

melanggar, sehingga diharapkan memotivasi pegawai untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

5. Ceramah agama, moral dan etika

   Dengan pendkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas keseharian dalam pekerjaan.

Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tindakan perbaikan dan umpan balik.

Kegiatan Pengawasan Represif ini dilakukan, setelah aparat pengawasan di bidang kepegawaian :

1. Menerima tembusan surat keputusan-surat keputusan/nota persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Menemukan permasalahan di bidang kepegawaian.
3. Menerima pengaduan secara langsung maupun tidak langsung tentang penyimpangan di bidang peraturan kepegawaian.
4. Mendapat informasi melalui media cetak, media elektronik, kotak pos dan yang sejenisnya yang menyangkut penyimpangan di bidang kepegawaian.
5. Menduga ada penyimpangan di bidang peraturan kepegawaian oleh parat kepegawaian di suatu unit atau instansi.
6. Mendapat informasi dari suatu sumber yang tidak jelas identitasnya yang menyangkut tentang penyimpangan di bidang peraturarn kepegawaian.

Pada Pelaksanaan pengawasan Represif ini mencakup :

1. **Penyusunan Formasi**

Yang perlu diperhatikan terhadap masalah yang mungkin timbul akibat kurang tepatnya penyusunan formasi, apakah dalam setiap penyusunan formasi terdapat penyimpangan atau tidak.

2. Penetapan Formasi

Dalam pemeriksaan penetapan formasi BKN menyesuaikan dengan prinsip alokasi formasi yang tepat dan akurat, dan Kemampuan keuangan negara.

3. Pengadaan Pegawai (Recruitment)

1) Dalam Pengadaan Pegawai BKN, BKN mengantisipasi masalah yang mungkin terjad, yaitu yang menyangkut:

a. Persyaratan

b. Penguman,

c. Peleksi,

d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil,

e. Penempatan,

f. Pengangkatan calon PNS menjadi PNS,

g. Sumpah janji Pegawai negeri Sipil (SPNS),

h. CutiKenaikan Pangkat,

i. Daftar Urut Kepangkatan,

j. Pindah wilayah Kerja,

k. Pendidikan dan Pelatihan PNS,

l. Perangkat, Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural,

melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian di BKN Kanreg III Bandung.

Ada dua macam jenis laporan di BKN Kanreg III Bandung , yaitu :

a. *Progress* yaitu laporan memuat segala hal-hal yang terkait dengan kemajuan BKN Kanreg III Bandung.

a. *Material* atau *fisik* yaitu laporan yang memuat salah satu segi atau bidang tertentu saja, misalnya yang menyangkut keuangan saja.

Bentuk Laporan

Dalam melaksanakan tugas, setiap aparat pengawasan di BKN Kanreg III Bandung diharuskan untuk membuat laporan.

Ada dua macam bentuk laporan, yaitu :

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis memiliki kelebihan karena lebih lengkap, konkrit, dan lebih terbuka, sehingga mudah bagi pimpinan BKN Kanreg III Bandung untuk mempelajarinya.

b. Laporan Lisan

Laporan ini biasanya digunakan apabila pimpinan BKN Kanreg III Bandung ingin dapat informasi lebih cepat dan bersifat rahasia.

Sifat Laporan

Ada dua macam sifat laporan

a. Insidentil

Yang dimaksud dengan insidentil adalah laporan yang dibuat sewaktu-waktu, biasanya laporan ini dibuat kalau ada kejadian diluar dugaan.

b. Berkala

Pembuatan laporan berkala ini dibuat secara teratur sesuai dengan ketentuan atau instruksi pimpinan BKN Kanreg III Bandung. Biasanya laporan berkala ini adalah laporan harian, mingguan, bulanan, kwartal dan tahunan.

Isi Laporan

Sebuah laporan yang baik paling tidak mencakup tiga aspek penting:

a. Laporan tersebut memuat kemajuan-kemajuan yang dicapai secara akurat dari obyek yang diteliti;
b. Laporan tersebut memuat masalah-masalah yang dihadapi oleh obyek yang diteliti;
c. Laporan tersebut memuat pemikiran-pemikiran, pertimbangan serta saran pemecahan masalah.

2. Penilaian

Penilain adalah pengukuran terhadap keseluruhan penyelenggaraan terutama hasilkerja yang dicapai. Pengukuran dilakukan terhadap standar yang telah ditentukan terutama yang menyangkut:

a. Kuantitas atau jumlah/target;

b. Kualitas atau mutu.

Dalam proses evaluasi biasanya ditujukan pada aspek-aspek tertentu yang disebut *"Control Area"*, yang mencakup aspek-aspek dengan istilah aspek :

a. Posisi sosial

b. Rentabilitas

c. Produktivitas

d. Manajemen efisiensi

e. Sikap kelakuan personil

f. Kondisi fisik

g. Realisasi budget